

Ancaman dan Tantangan terhadap Ideologi Pancasila

Peni Sekarsari^{a,1*}, Hamidah Ulfa Fauziah^{b,2}, Mas Fierna Janvierna Lusie Putri^{c,3}

^{abc}Program Studi Doktor Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Yogyakarta

¹penisekarsari.2023@student.uny.ac.id; ²hamidah0023fishipol.2023@student.uny.ac.id;

³mas0032fishipol.2023@student.uny.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 23 Mei 2024, direvisi: 24 Mei 2024, disetujui: 25 Mei 2024

Abstrak

Penerapan nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada degradasi moral generasi muda yang terpengaruh oleh kemajuan peradaban yang sangat pesat sehingga menghilangkan sekat antar bangsa di dunia. Penulisan kajian ini bertujuan untuk menganalisis globalisasi dan krisis moralitas, Pancasila dalam sudut pandang masa kini, tantangan pengamalan nilai-nilai Pancasila, serta pemulihan dan penerapan nilai Pancasila dalam upaya pembentukan moral bangsa. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, karena teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah buku dan artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pancasila merupakan pandangan hidup atau ideologi yang bersumber dari nilai-nilai moral bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam negara masih kurang bahkan jauh dari kata baik. Adanya globalisasi dan modernisasi membuat masyarakat lupa dengan tujuan awal dari reformasi itu sendiri. Globalisasi menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin tenggelam dan dilupakan, sementara di sisi lain hanya dengan pengimplementasian nilai Pancasila maka krisis moralitas bangsa yang disebabkan oleh globalisasi dapat diatasi. Adanya globalisasi membuat integrasi dalam sistem budaya nasional ke dalam sistem budaya global. Generasi penerus bangsa harus meningkatkan Pancasila dengan cara membangkitkan rasa nasionalisme, melestarikan dan mensosialisasikan secara berkelanjutan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan bermasyarakat.

Kata-kata kunci: ancaman; tantangan; ideologi Pancasila

Abstract

The implementation of Pancasila values is faced with the moral degradation of the younger generation who are affected by the rapid progress of civilization that removes barriers between nations in the world. The aim of writing this study is to analyze globalization and the crisis of morality, Pancasila from a contemporary perspective, the challenges of implementing Pancasila values, as well as the restoration and application of Pancasila values in efforts to shape the nation's morals. This study uses a literature study approach, because the data collection technique in this study was carried out by examining books and articles related to the main issues discussed. Pancasila is a way of life or ideology that originates from the moral values of the Indonesian people before independence. The practice of Pancasila values in the country is still lacking or far from good. The existence of globalization and modernization makes people forget the original purpose of reform itself. Globalization causes the values of Pancasila to become increasingly submerged and forgotten, while on the other hand, only by implementing Pancasila values can the national morality crisis caused by globalization be overcome. The existence of globalization creates integration of national cultural systems into the global cultural system. The nation's next generation must improve Pancasila by awakening a sense of nationalism, preserving and continuously socializing the values contained in Pancasila in social life.

Keywords: threat; challenge; Pancasila ideology

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang heterogen dengan berlandaskan Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpengaruh pada pola berfikir dan gaya hidup masing-masing individu terutama kaum milenial. Oleh karena itu, dapat melunturkan nilai-nilai budaya Indonesia yang seharusnya sebagai generasi milenial dapat mempertahankan dan mengembangkan budaya sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Generasi muda sebagai pewaris budaya bangsa harus mampu menerapkan sekaligus mempertahankan budaya yang dimiliki (Herwansyah, 2017). Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara yaitu Pancasila sudah mengandung hal-hal yang dapat memberikan arah yang baik kepada generasi muda tersebut. Manusia sebagai makhluk individu harus paham mengenai hakikat sebenarnya Pancasila. Kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan ini sangat memengaruhi gaya hidup yang bila dibiarkan terus menerus akan menjadi budaya sehingga kebudayaan leluhur Indonesia akan mulai luntur.

Penerapan nilai tersebut harus dilakukan agar pemuda milenial ini tahu akan batasannya melihat perkembangan IPTEK yang semakin pesat dan canggih. Tanpa ada pengalaman nilai-nilai Pancasila mereka akan terus terjebak dalam dunia kebebasan dalam mengakses apapun, instan dalam berbagai hal seperti belanja, mengerjakan tugas ke joki tugas dan masih banyak lagi. Pancasila berkedudukan sebagai landasan nilai dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sholahudin, 2019). Dalam penerepannya ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar dapat terlaksana dengan baik serta efisien. Era milenial sangat berpengaruh

dalam perkembangan Indonesia karena tidak lain dan tidak bukan mungkin 10 atau 5 tahun kedepan mereka akan mejadi pemimpin bangsa ini. Yang tentu diiringi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin luas dan maju. Hal ini memerlukan persiapan mulai dari sekarang, agar nantinya nilai pancasila itu tidak luntur bahkan hilang karena teknologi masa nanti. Nilai-nilai Pancasila ini harus senantiasa dijaga dan dipelihara karena ciri khas suatu bangsa dan merupakan harta warisan yang sangat berharga untuk negara. Pemuda yang berjiwa nasionalisme selalu menanamkan pancasila di hatinya sebagai pedoman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga mereka akan hidup aman, tenteram, damai serta dapat memelihara kekhasannya.

Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ada sejak dahulu. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila berasal dari kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Prinsip-prinsip Pancasila saling berkaitan satu sama lain dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila disimbolkan dalam bentuk piramid yang menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada titik tertinggi yang menjwai dan mendasari sila-sila lainnya (Yusdianto, 2016). Nilai-nilai Pancasila yang ada kemudian ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber yang ada, baik ideologi, falsafah, hukum, dan pemerintahan Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila dasar yang melambangkan jati diri Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peran sebagai hukum dasar

suatu negara, ideologi, serta pandangan hidup NKRI dengan tujuan memajukan, mencerdaskan, dan membangun persatuan kesatuan bangsa di tengah-tengah peradaban dunia. Namun, pada kenyataannya, era reformasi globalisasi sekarang telah membuat nilai-nilai Pancasila mulai punah dan terlupakan.

Posisi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sepanjang sejarah telah mengalami pergeseran dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Pancasila setelah orde baru runtuh seolah-olah berada dalam pusaran sejarah yang tidak dapat lagi disertakan dalam proses reformasi. Pancasila kini semakin jarang dibicarakan, dikutip, dan didiskusikan dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat bahkan ada banyak orang yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia hampir melupakan jati diri yang sebenarnya yaitu Pancasila. Globalisasi dan Pancasila saling terkait satu sama lain. Tatanan hidup global berubah seiring berjalannya waktu, yang secara langsung mempengaruhi tatanan hidup suatu negara (Hanafi, 2018). Hal ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat. Dampak globalisasi salah satunya yaitu peningkatan kecenderungan masyarakat untuk melakukan hal-hal yang merugikan misalnya seperti degradasi moral.

Pancasila sebagai dasar negara semakin terpinggirkan dalam ritme kehidupan Indonesia yang ditandai dengan hiruk pikuk suasana demokrasi dan kebebasan politik. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara semakin berkurang, seolah-olah hanya menyisakan kedudukan resminya saja (Setyaningsih, 2019). Bangsa Indonesia harus mampu menghadapi tekanan globalisasi yang semakin meluas.

Bangsa Indonesia harus terus menggali dan mewujudkan nilai-nilai dasar yang akan menjadi tumpuan dan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai dan falsafah Pancasila mulai tergerus oleh derasnya arus globalisasi yang dianggap merupakan jawaban dari proses kemajuan suatu negara dalam tatanan global. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan yang ada pada media massa seperti koran tabloid dan lain sebagainya maupun berita dalam wadah digital berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kian jauh dan menyimpang dari nilai-nilai yang ada. Adanya globalisasi dan infiltrasi budaya yang tak terkendali membuat masyarakat cenderung mengikuti arus perkembangan tanpa melakukan filterisasi terlebih dahulu. Filterisasi budaya sangat penting untuk dilakukan agar budaya yang baru tidak menghilangkan nilai-nilai dari budaya yang asli (Eddy, 2018). Akibatnya adanya globalisasi ini merosotnya moralitas bangsa Indonesia dan apabila tidak diatasi, maka diprediksi Pancasila dan nilai-nilai atau jati diri bangsa Indonesia yang telah dibangun sejak dulu akan hilang begitu saja dan tergantikan dengan ideologi baru dunia. Oleh karena itu, diperlukan suatu gerakan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud dari upaya menanggulangi krisis moralitas yang terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis mengangkat judul “Ancaman dan Tantangan terhadap Ideologi Pancasila” sebagai topik yang dibahas dalam artikel jurnal untuk mengatasi permasalahan moralitas yang terjadi di Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan oleh

masyarakat Indonesia diharapkan dapat memfilter segala budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama dalam penulisan artikel ini yaitu berasal dari buku, diantaranya yaitu (a) Pancasila di Arus Globalisasi dalam Memperkuat Reformasi Moral Indonesia oleh Aulia, (b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi oleh Ahmad Jamalung, Sukino, dan Sulha, (c) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) oleh Ani Sri Rahayu. Artikel ilmiah yang berasal dari jurnal *online* menjadi sumber data pendukung dalam penulisan artikel ini. Kajian studi pustaka dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, tahap pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah informasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas (Tahmidaten & Krismanto, 2020). Prosedur yang dilakukan dalam kajian studi pustaka, meliputi (1) menggali ide umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas, (2) mencari sumber referensi yang mendukung topik bahasan, (3) mempertegas fokus penelitian dan mengorganisasi bahan yang sesuai, (4) mencari dan menemukan sumber data, (5) melakukan reorganisasi bahan dan memberikan kesimpulan yang diperoleh dari sumber data, (6) tahap selanjutnya melakukan *review* terhadap informasi yang telah diperoleh dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah, (7) menambahkan beberapa wawasan sumber data berfungsi memperkuat hasil analisis data, dan (8) penyusunan artikel ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Globalisasi dan Krisis Moralitas

Revolusi di Indonesia saat ini yakni industri 5.0 telah membawa angin perubahan dalam tatanan peradaban dunia. Dinamika antara lokal dan global dalam suatu negara menjadi samar bahkan saling mendominasi satu sama lain untuk mendapatkan atensi masyarakat. Budaya dan nilai-nilai lokal bangsa kerap kali tergerus oleh pengaruh modernisasi dengan dalih menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, apakah hal tersebut benar adanya? Adakah hal lain yang ternyata menjadi korban dari transformasi tersebut? Modernisasi pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang (Koentjaraningrat). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modernisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses pergeseran perilaku dan moral sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan modernisasi merupakan peralihan dari kehidupan yang bersifat “lokal” menjadi “global”.

Modernisasi berkaitan erat dengan globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari kata global yang bermakna universal (Sholahudin, 2019). Pada praktiknya, baik globalisasi dan modernisasi telah mengubah cara hidup individu dari suatu negara menjadi lebih terbuka kepada dunia luar. Hal tersebut tentu saja berdampak positif pada proses membaurnya ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain tidak dapat dihindari juga terdapat dampak negatif yang muncul dari adanya globalisasi tersebut. Globalisasi seperti pedang bermata dua. Globalisasi yang tidak terkendali membuat infiltrasi budaya menjadi tidak terbandung dan berdampak pada krisis

moralitas bangsa, termasuk Indonesia (Setyaningsih, 2019). Moral adalah perilaku individu dalam bertindak baik atau buruk yang dipengaruhi oleh ajaran, lingkungan, dan pola pikir individu tersebut.

Moral antar individu suatu negara dengan negara lainnya belum tentu sama, ditentukan oleh ukuran dan perbedaan masing-masing wilayah. Di Indonesia sendiri, moralitas bangsa Indonesia diukur berlandaskan falsafah dan ideologi NKRI sendiri, yaitu Pancasila. Namun, dalam realitanya, moral bangsa Indonesia terutama kaum pemuda sudah jauh menyimpang dari nilai-nilai yang ada. Generasi muda saat ini terperangkap dalam kubangan hitam globalisasi berdalih “*trend*” milenial (Budiarto, 2020). Krisis moralitas terjadi setiap harinya, baik dari kaum pemuda maupun orang dewasa sekalipun. Sebut saja pergaulan bebas yang telah meluas di kalangan muda Indonesia. Berawal dari menonton film atau serial barat yang menampilkan adegan tidak pantas, pemuda kemudian meniru adegan tersebut dengan dalih hal itu sudah biasa dan wajar dilakukan di luar sana. Ada juga yang menganggap budaya Indonesia terlalu kuno, ketinggalan zaman, dan tidak keren sama sekali. Padahal faktanya, hal tersebut memang bertentangan dengan prinsip moralitas Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Contoh lain dapat diambil dari maraknya fenomena hedonisme sebagai wujud dari paham bahwa kenikmatan dan kesenangan dunia merupakan tujuan utama dalam hidup seseorang. Akibatnya, banyak terjadi kasus seperti seks bebas, narkoba, homoseksual, dan sebagainya yang menimbulkan degradasi moral bangsa Indonesia.

Pancasila dalam Sudut Pandang Masa Kini

Seperti yang diketahui sebelumnya, moralitas bangsa Indonesia haruslah berasal

dari dasar dan ideologi NKRI sendiri. Pancasila merupakan suatu ideologi yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi acuan segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia serta sumber segala hal untuk mengatur pemerintahan (Hisyam, 2021). Pancasila, yang berasal dari kata “Panca” yang berarti lima dan “Sila” yang berarti dasar tentu saja tidak muncul begitu saja dan ditetapkan menjadi dasar negara. Usulan mengenai dasar negara pertama kali mulai diperbincangkan dalam sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1945 oleh para *founding fathers* dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila pertama kali dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia oleh Ir. Soekarno. Tidak sampai disitu, Pancasila kerap mengalami proses panjang sebelum akhirnya benar-benar ditetapkan menjadi dasar negara, mulai dari perubahan bunyi sila pertama, pembentukan Panitia Sembilan, PPKI, hingga perumusan resmi Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal itu membuktikan bahwa Pancasila tidak dirumuskan secara “asal jadi” saja, melainkan benar-benar melalui proses yang panjang dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka.

Faktanya, walaupun Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup yang bersumber dari bangsa Indonesia, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam negara masih kurang bahkan jauh dari kata baik. Pancasila digolongkan sebagai ideologi tengah antara dua ideologi besar dunia yang paling berdampak pada dunia, yaitu ideologi komunisme dan kapitalisme. Pancasila juga tidak menganut paham individualisme atau kolektivisme, bahkan bukan beracuan pada paham teokrasi (paham dimana prinsip ketuhanan menjadi

prinsip utama) maupun sekuler (paham dimana sebuah pemerintahan harus terpisah dari agama atau kepercayaan) (Eddy, 2018). Dengan kata lain, posisi Pancasila berada di tengah, tidak memihak keduanya, namun berdiri diatas ideologi sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun, tanpa disadari, justru karena hal inilah aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sukar dilakukan oleh masyarakat Indonesia bahkan meskipun itu berasal dari nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Hal itu dikarenakan proses globalisasi dan infiltrasi budaya yang masuk membuat masyarakat terombang-ambing oleh berbagai jenis paham dan ideologi yang tengah berkembang, dan mulai mempertanyakan bahkan meragukan ideologi yang selama ini ada di Indonesia.

Problematika ideologi negara telah ada bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. Pada masa orde lama, peranan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi titik awal pembangunan jati diri bangsa. Pancasila masih dalam tahap pembangunan untuk mewujudkan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tetapi, dalam prosesnya terdapat banyak penyimpangan yang terjadi sehingga muncullah pergantian ke masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada masa orde baru, muncul gagasan sebagai solusi pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang dianggap telah menyimpang saat masa orde lama, yaitu dengan pembentukan P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) atau Eka Prasetya Pancakarsa yang disahkan dalam TAP MPR No.II/MPR/1978. Rumusan tersebut menghasilkan 36 butir nilai sebagai pedoman praktis pelaksanaan Pancasila. Namun, dalam praktiknya, pada masa itu masih terdapat penyimpangan bahkan terjadi krisis kemanusiaan besar-besaran yang terjadi

pada tahun 1998. Hal itu terus terjadi hingga akhirnya dimulailah masa reformasi di Indonesia. Pada masa ini, UUD 1945 kembali menjadi konstitusi negara setelah diamandemen kembali pada tahun 2002. Masa reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan dari seluruh warga negara untuk melaksanakan demokratisasi pada semua bidang melalui upaya penegakkan hukum dan keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelaksanaan Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan TNI dan POLRI (Wiyono, 2013). Singkatnya, reformasi bertujuan untuk membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila yang telah menyimpang dari periode-periode sebelumnya.

Peran reformasi yang dicanangkan akan memulihkan nilai-nilai Pancasila pada kenyataannya menemui banyak rintangan dan hambatan bahkan sampai sekarang. Adanya globalisasi dan modernisasi membuat masyarakat lupa dengan tujuan awal dari reformasi itu sendiri. Pilar-pilar Orde Baru memang berhasil diruntuhkan (Rundjan, 2018) tidak ada lagi kasus penembakan dan pembantaian massal seperti pada tragedi 1998, namun lunturnya sikap penghargaan dan kemanusiaan Pancasila di masa sekarang sudah cukup membuktikan bahwa Pancasila belum dapat diaktualisasi dengan baik di dalam masyarakat Indonesia. Ambil saja contoh kasus pemalsuan alat tes antigen covid-19 yang terjadi di Sumatera Utara, hal ini menunjukkan terjadinya krisis moralitas bahkan saat dimana seharusnya masyarakat Indonesia saling bahu-membahu melawan fenomena pandemi yang tengah melanda. Contoh lain ada pada kasus dimana warga

negara asing (WNA) di Bali mencoba melakukan tipuan (*prank*) dengan menggambar wajahnya seolah-olah sedang memakai masker untuk mengelabui petugas. Mungkin baginya ini hanyalah kejahilan yang sepele, namun tentu saja hal ini telah bertentangan dengan hukum Indonesia yang berlaku bahkan dapat berakibat fatal bagi masyarakat setempat. Dari kedua kasus diatas, dapat dilihat nilai-nilai Pancasila masih belum dapat diterapkan sepenuhnya dan krisis moralitas Pancasila masih menjadi problematika bangsa yang tak kunjung usai.

Tantangan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Krisisnya moralitas bangsa Indonesia kini semakin tidak terkendali. Diperlukan adanya pedang yang dapat memerangi tragedi degradasi moral Indonesia. Pedang tersebut tak lain tak bukan adalah Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi dalam membangun kembali moral bangsa yang telah hilang. Namun, pada prakteknya, hal ini masih menjadi tantangan tersendiri mengingat derasnya arus globalisasi pada masa kini. Terjadi roda perputaran tanpa batas antara Pancasila dan globalisasi. Globalisasi menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin tenggelam dan dilupakan, sementara di sisi lain hanya dengan pengimplementasian nilai Pancasila maka krisis moralitas bangsa yang disebabkan oleh globalisasi dapat diatasi. Hal ini tentu menjadi dilema, bukan hanya bagi segelintir pihak tertentu, melainkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Adanya globalisasi membuat integrasi dalam sistem budaya nasional ke dalam sistem budaya global. Dengan kata lain, terjadi homogenisasi kultural (penyeragaman budaya) dalam suatu tantangan global yang membuat nilai Pancasila menjadi samar dan tidak dapat lagi ditemukan

dalam sendi-sendi kehidupan bangsa (Sholahudin, 2019). Untuk lebih jelas, berikut akan dibedah tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila berdasarkan kelima butir sila yang ada:

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Tercantum pada sila pertama dalam Pancasila ini mengandung makna bahwa sebagai manusia yang diciptakan, sudah sewajibnya kita beribadah kepada Tuhan dan menjauhi larangan-Nya (Asmaroini, 2017). Masyarakat Indonesia diberikan hak dan kebebasan untuk beribadah sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, terlepas dari suku, ras, maupun latar belakang masing-masing individu. Aktivitas keagamaan dan ibadah kepada Sang Pencipta merupakan hal dasar yang penting dan harus ada dalam masyarakat Indonesia mengingat ideologi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa salah satunya adalah ketuhanan. Namun faktanya, terjadi banyak penyimpangan etika dan moral berkaitan dengan pengamalan sila pertama ini. Penyimpangan tersebut disebabkan adanya paham dari budaya luar yang masuk ke Indonesia dan tidak berhasil di filterisasi dengan baik oleh masyarakat Indonesia, contohnya seperti paham ateisme dan agnostisisme. Ateisme adalah paham penolakan secara filosofis terhadap eksistensi Tuhan (Herwansyah, 2017), sementara agnostisisme adalah paham dimana ada atau tidaknya Tuhan adalah suatu hal yang dapat diketahui atau tidak diketahui. Dengan kata lain, baik ateisme maupun agnostisisme sama-sama meragukan dan tidak mempercayai keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta di bumi. Hal ini memang lumrah di negara Barat, namun tentu saja bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Selain infiltrasi budaya, tantangan aktualisasi sila pertama Pancasila

dapat dilihat dari kemerosotan minat masyarakat dalam beribadah, ketidakrelevanan metode pengajaran agama di sekolah dengan kondisi masa kini, serta sikap fanatisme sekelompok pihak yang berujung anarki.

Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna masyarakat Indonesia yang memiliki budi dan kesadaran moral kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan setiap manusia. Nilai persamaan derajat, hak, kewajiban, hak asasi, nilai kemanusiaan dan keadilan tercantum didalamnya. Pada praktiknya, masih terdapat banyak isu dan penyimpangan yang terjadi karena krisisnya nilai-nilai kemanusiaan tersebut, contohnya kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan atau korupsi yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Hal ini disebabkan adanya krisis moralitas yang terjadi karena krisis keimanan seperti pada poin pertama (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menyebabkan manusia kehilangan pedoman hidup dan mencari pembenaran yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Selain itu, munculnya paham hedonisme, yaitu paham dimana kebahagiaan adalah tujuan hidup dari kelahiran seseorang menimbulkan persepsi dan tolak ukur yang salah bagi setiap manusia, dimana pada akhirnya setiap orang hanya akan peduli dengan diri mereka sendiri dan melupakan hukum-hukum kodrati yang ada, baik hukum alam, kemanusiaan, maupun hukum negara sekalipun. Hal ini lagi-lagi dikarenakan adanya proses infiltrasi budaya asing yang tidak dapat terserap dan disaring dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, masalah internal negara juga dapat menjadi tantangan dalam pengamalan sila ini, seperti ketidaktegasan hukum dan krisis ekonomi negara.

Ketiga, yakni persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini membahas berkaitan dengan nilai persatuan atau kerukunan bagi seluruh warga negara yang mempunyai perbedaan agama, bahasa, dan budaya, sehingga kemudian dapat disatukan melalui satu nilai dalam Pancasila. (Hanafi, 2018). Tujuan dalam sila ini terpatri jelas dalam semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari bahasa Jawa kuno dengan pengertian berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai-nilai yang tercantum dalam nilai seluruh sila ketiga diantaranya adanya rasa solidaritas, kebersamaan, cinta tanah air, dan persatuan antar masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, dalam pengamalannya sila ketiga ini masih menemukan tantangan seperti paham individualisme dan fanatisme yang melekat pada sekelompok orang. Selain itu, adanya krisis kemanusiaan seperti pada poin kedua juga menjadi penyebab terjadinya perpecahan dalam persatuan Indonesia. Akibatnya, masih terdapat banyak kasus yang muncul seperti tawuran antar kelompok, penghasutan paham tertentu, diskriminasi antar etnik, dan sebagainya.

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung makna demokrasi, yang artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, dimana pemerintahan dilaksanakan melalui insan yang memiliki jiwa profesional dan memiliki integritas tinggi melalui sistem musyawarah yang berdasar pada kepentingan rakyat (Yusdianto, 2016). Nilai-nilai yang termuat pada sila ini memuat mengenai pentingnya makna demokrasi, kebijaksanaan, dan transparansi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Negara

Indonesia terdapat beberapa kasus yang bertolak belakang dengan nilai-nilai sila keempat ini, misalnya politik uang, praktik KKN, dan tidak transparan dalam mengelola pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang dapat membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan manipulasi dengan berkedok kesejahteraan rakyat. Adanya krisis moralitas dan kemanusiaan membuat manusia lupa diri dan bertindak semena-mena hanya untuk kepentingannya sendiri. Lebih parah lagi, lunturnya nilai demokrasi membuat sebagian orang merasa enggan untuk bersikap jujur dan terbuka karena adanya rasa ketakutan dan ketidakadilan.

Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir dalam Pancasila ini mengandung makna adanya keadilan di seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia demi tercapainya suatu negara yang adil dan makmur. Keadilan disini mencakup seluruh aspek sosial kehidupan berbangsa bernegara, termasuk persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi, serta kedudukan di mata hukum. Segala tindakan yang dilakukan masyarakat tidak akan dinilai berdasarkan derajat maupun status, melainkan hanya lewat hukum yang ada di Indonesia. Namun faktanya, implementasi sila kelima ini tidak semudah yang diucapkan. Seperti pada sila-sila sebelumnya, terdapat tantangan yang membuat pengimplementasian sila ini sulit dilakukan, seperti kemajuan teknologi dan globalisasi yang menjadikan manusia bersifat egois, individualis, dan dapat mengarah pada paham kapitalisme, pola pikir yang dualistik, adanya hirarki, sifat dominatif, dan marginalisasi kaum miskin (Elsa, 2018). Krisis moralitas dan kemanusiaan yang disebabkan oleh proses infiltrasi budaya yang tak terkendali menjadi

faktor mengapa keadilan begitu sulit ditegakkan di Indonesia. Dari kelima sila diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila antara satu dengan lainnya saling berkesinambungan. Tantangan-tantangan yang ada pada masing-masing sila sebenarnya saling berkaitan dan bersumber dari satu masalah, yaitu pandangan dan pemikiran masing-masing individu dalam menghadapi globalisasi dan infiltrasi budaya yang tengah berkembang. Kita tidak dapat mencegah arus, tetapi kita dapat mempersiapkan mental agar dapat melakukan filterisasi dengan bijak sesuai nilai-nilai ideologi negara yaitu Pancasila.

Pemulihan dan Penerapan Nilai Pancasila dalam Upaya Pembentukan Moral Bangsa

Di Era Globalisasi saat ini Pancasila sangat dibutuhkan sebagai pembatas tentang budaya-budaya yang dapat kita terapkan dan budaya-budaya yang tidak harus kita terapkan. Pemulihan dan penerapan nilai Pancasila ini sangat berkaitan dengan sikap moral maupun tingkah laku Bangsa Indonesia. Dalam pemulihan nilai pancasila dibutuhkan pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang ada di masyarakat serta dibutuhkan suatu keadaan yang dapat menunjang terlaksananya pemulihan nilai pancasila tersebut seperti sikap warga negara dan juga wujud realisasi nilai-nilai pancasila. Kondisi moral bangsa Indonesia saat ini dapat dengan mudah kita lihat, yaitu dengan identifikasi perilaku masyarakat sehari-hari. Dengan mencermati dan memahami pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah revitalisasi the moral power yang merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan sikap moral bangsa. Franz Magnis-Suseno

merumuskan etika Pancasila pada lima pedoman yang mudah dimengerti oleh masyarakat, diantaranya: 1) menghindari adanya tekanan, 2) menciptakan manusia yang selalu bertindak dengan mengutamakan nilai kemanusiaan, 3) perjuangan dan persatuan bersama, 4) mengupayakan demokrasi sesuai dengan harapan bersama, dan 5) meminimalisir adanya kesenjangan dalam kehidupan supaya dapat hidup secara manusiawi. kelima pedoman tersebut muncul sebagai reaksi atas kondisi moral masyarakat saat ini.

Pemulihan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara penggalan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempertimbangkan sikap rasionalitas dan mengaktualisasikan nilai Pancasila ketika mengatasi segala masalah-masalah pada zaman saat ini. Pancasila merupakan rumusan dasar negara yang bersumber pada nilai moral jati diri bangsa, mulai dari nilai moral agama, sosial dan budaya yang telah mengakar dan melekat. Aktualisasi nyata nilai Pancasila mulai dari kesadaran subjektif dan objektif warga negara itu sendiri. Kesadaran subjektif yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, dan setiap orang Indonesia. Kesadaran subjektif merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan sikap sadar, taat dan kesiapan seluruh warga negara untuk direalisasikan dengan mewujudkan moral bangsa yang berpedoman pada nilai Pancasila. Kesadaran subjektif berkaitan dengan kesadaran objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Bila kesadaran subjektif ini telah dilaksanakan maka akan terwujud moral bangsa yang berpegang pada nilai Pancasila. Sedangkan kesadaran objektif adalah bentuk nyata dalam penyelenggaraan kenegaraan oleh lembaga-

lembaga negara. Hal yang paling penting dalam pemulihan dan penerapan nilai-nilai Pancasila ini adalah kesadaran untuk melaksanakan Pancasila.

Dari uraian diatas maka agar pemulihan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan dibutuhkan pengetahuan yang benar tentang Pancasila, menyadari dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu aspek penting untuk memahami pengetahuan yang benar tentang Pancasila dalam upaya pembentukan moral bangsa. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan yang artinya pendidikan disini harus bisa membawa pembangunan dalam Bangsa. Hal ini berarti bahwa membangun moral bangsa hanya dapat terlaksana apabila seluruh warga negara memiliki jiwa yang mengedepankan pembangunan secara material, spiritual serta sosial budaya. Pendidikan Pancasila, masyarakat akan memahami tentang nilai-nilai Pancasila dan mengetahui tentang batasan dalam menerima budaya-budaya asing yang masuk sehingga moral bangsa Indonesia.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pemulihan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pembentukan moral bangsa, diantaranya sebagai berikut. Peningkatan perhatian bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila. Untuk menghadapi berbagai macam dampak negatif yang masuk maka perhatian bangsa terhadap nilai Pancasila harus ditingkatkan kembali dengan cara membangkitkan kembali rasa nasionalisme dan mengunggah dan mensosialisasikan secara terus-menerus nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan Intensitas pemberian pembelajaran mengenai

Pendidikan Pancasila baik melalui teori maupun praktik. Nilai-nilai Pancasila mulai terindikasi untuk dilupakan, maka cara ampuh untuk mengembalikannya adalah melalui pendidikan Pancasila. Melalui Pendidikan Pancasila, masyarakat akan memahami tentang nilai-nilai Pancasila dan mengetahui tentang batasan dalam menerima budaya-budaya asing yang masuk sehingga moral bangsa Indonesia yang ada sejak dulu tidak terkikis bahkan hilang dari jati diri bangsa Indonesia.

Penyesuaian diri masyarakat dengan adanya globalisasi saat ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan globalisasi yang semakin tidak ada batasnya. Warga negara harus melakukan filterisasi terhadap dampak-dampak negatif dari globalisasi dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu bentuk jati diri yang melekat pada bangsa Indonesia. Pemulihan dan penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan jalan yang tepat untuk membentuk moral bangsa yang mulai tergerus dengan adanya dampak negatif dari globalisasi. Upaya sadar yang diusahakan dengan pemulihan dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Pengaruh adanya pemulihan dan penerapan nilai-nilai Pancasila ini dapat mewujudkan moral bangsa Indonesia terjaga sebagai wujud nyata jati diri dari bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar ideologi dan pandangan hidup yang bersumber dari bangsa Indonesia, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam negara masih kurang bahkan jauh dari kata baik. Peran reformasi yang dicanangkan akan memulihkan nilai-nilai Pancasila pada

kenyataannya menemui banyak rintangan dan hambatan bahkan sampai sekarang. Adanya globalisasi dan modernisasi membuat masyarakat lupa dengan tujuan awal dari reformasi itu sendiri. Globalisasi menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin tenggelam dan dilupakan, sementara di sisi lain hanya dengan pengimplementasian nilai Pancasila maka krisis moralitas bangsa yang disebabkan oleh globalisasi dapat diatasi. Hal ini tentu menjadi dilema, bukan hanya bagi segelintir pihak tertentu, melainkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Adanya globalisasi membuat integrasi sistem budaya nasional dengan sistem budaya global. Dengan kata lain, terjadi homogenisasi kultural (penyeragaman budaya) dalam suatu tantangan global yang membuat nilai Pancasila menjadi samar dan tidak dapat lagi ditemukan dalam sendi-sendi kehidupan bangsa. Nilai Pancasila harus ditingkatkan kembali dengan cara membangkitkan rasa nasionalisme, meningkatkan keutuhan berbangsa dan mensosialisasikan secara berkelanjutan nilai yang tercantum dalam sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Referensi

- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-nilai Pancasila bagi Siswa di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 50-64.
- Aulia, S. S. (2017). *Pancasila di Arus Globalisasi dalam Memperkuat Reformasi Moral Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Krisis Moral dan Karakter. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 50-56.
- Chairiyah. (2014). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pendidikan Karakter. Trihayu: *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 1(1), 54-62.
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa Bernegara. Dharmasmrti: *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 1(18), 116-123.
- Hanafi. (2018). Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 56-63.
- Herwansyah. (2017). Penyangkalan Adanya Tuhan dalam Pandangan Ateis dan Sains Modern. *Jurnal Ilmu Agama*, 18(1), 97-104.
- Setyaningsih, S. (2019). Dampak Globalisasi terhadap Moral Generasi Muda. *Jurnal Agama Hindu*, 22(1), 1-10.
- Sholahudin, U. (2019). Globalisasi: Antara Peluang dan Ancaman bagi Masyarakat Multikultural. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4(2), 103-114.
- Wiyono, S. (2013). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Panduan dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 15(1), 37-52.
- Yusdianto. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 259-272.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]